



Media Massa : **JOGJA**

Data Covid-19 Tak Sinkron

JOGJA—Data Covid-19 yang dirilis Pemda DIY dengan pemerintah kabupaten/kota tidak sinkron. Perbedaan data ini berpotensi memengaruhi kebijakan penanganan Covid-19 yang diambil.

Ujang Hasanudin, Sirojul Khafid, & Jumali
redaksi@harianjogja.com

▶ Ketidaksinkronan data Covid-19 terjadi sejak akhir Maret lalu.

▶ Masyarakat diminta tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan yang ketat.

Tidak tanggung-tanggung kesenjangan data kasus terkonfirmasi positif Covid-19 ini mencapai ribuan. Hal itu diungkapkan Pendiri Laboratorium Statistik Terapan RoomStat, Budhi Handoyo Nugroho, yang selama ini aktif mengamati pencatatan kasus Covid-19 yang dilakukan Pemda DIY dan pemerintah kabupaten/kota.

Budhi mencatat angka kasus terkonfirmasi kumulatif sampai 4 Juni 2021 sebanyak 45.737 kasus yang dicatat Dinas Kesehatan DIY. Sementara angka kompilasi dari kabupaten dan kota tercatat 47.324 kasus terkonfirmasi secara kumulatif, sehingga terjadi ketimpangan kasus terkonfirmasi sebanyak 1.587.

Kasus aktif berdasarkan catatan Dinas Kesehatan DIY per 4 Juni 2021 sebanyak 2.573 kasus. Sementara yang tercatat di kabupaten dan kota kasus aktif ada 3.060 kasus, sehingga terdapat selisih 487 kasus. Untuk kasus kematian, yang tercatat Dinas Kesehatan DIY sampai 4 Juni 2021 total 1.208 kasus, sedangkan yang tercatat di kabupaten dan kota sebanyak 1.457 kasus, sehingga ada gap sebanyak 249 kasus.

Menurut Budhi, ketidaksinkronan data Covid-19 itu terjadi sejak akhir Maret lalu. Budhi sudah meminta konfirmasi langsung ke Dinas Kesehatan DIY dan

mendapat jawaban bahwa yang tercatat angka konfirmasi positif Covid-19 selama ini adalah hasil tes *polymerase chain reaction* (PCR), sedangkan kabupaten kota sudah menerapkan kombinasi tes antigen dan PCR.

"Padahal kan alat nasional sudah antigen, kabupaten kota sudah PCR dan antigen. Temuan positif PCR dan antigen tercatat di kabupaten kota, tapi di provinsi tidak tercatat. Padahal kematian dari antigen juga ada," kata Budhi, Sabtu (5/6).

Ia tidak mengerti kenapa Pemda DIY tidak segera merevisi data hasil tes antigen juga merupakan bagian dari positif Covid-19, bukan sekadar untuk *tracing* dan *testing* semata.

"Yang ditakutkan kan ini untuk pemetaan DIY seolah kasus tidak sebesar itu, padahal setelah didetailkan di kabupaten kota [kasusnya] besar, kabupaten dan kota kasus naik, DIY justru landai, *alert* [peringatannya] kan jadi tidak *nyambung*," ujar Budhi.

"Apalagi DIY kan segera membuka pembelajaran tatap muka. Nanti kalau pencatatan masih kacau seperti ini, bagaimana dengan kasus-kasus yang muncul berikutnya kluster sekolah, dari sekolah ke rumah, ada mahasiswa juga yang datang," ujar Budhi.

AWAS CORONA!

▶ Halaman 11

Data Covid-19...

Ia menyatakan Kementerian Kesehatan sudah mengimbau pemerintah daerah agar mengencangkan *testing* dan *tracing* dengan antigen. Semestinya Pemda DIY juga mengakui hasil tes antigen dalam data terkonfirmasi positif Covid-19.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY, Berty Murtiningsih mengakui adanya perbedaan data yang dicatat Dinas Kesehatan DIY dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Perbedaan itu dikarenakan perbedaan waktu pencatatan. "Ada juga yang pemeriksaan antigen positif yang belum terkonfirmasi melalui PCR di kabupaten kota sudah dimasukkan konfirmasi," kata Berty.

Berty juga mempersilakan untuk membandingkan data tingkat DIY dan Pemerintah Pusat sesuai aplikasi *New All Record* (NAR). Ia mengakui perbedaan itu karena memang fasilitas kesehatan di DIY cukup banyak mencapai lebih dari 200 unit, termasuk laboratoriumnya.

Masih Tinggi

Berty Murtiningsih meminta masyarakat untuk tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan yang ketat, sebab penularan Covid-19 di DIY masih masif.

"Ya dengan masih meningkatnya kasus, ya mestinya masih masif penularan di masyarakat. Apalagi mayoritas kasus baru berasal dari hasil *tracing* kontak positif. Ini menunjukkan penerapan proses yang masih belum optimal," kata Berty.

Berty mengatakan memang

tidak mudah untuk mengubah perilaku masyarakat dengan adaptasi kebiasaan baru. "Tapi setidaknya mari kita bersamasama untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 ini dengan tetap disiplin pada protokol kesehatan, saling mengingatkan dan bekerja sama dengan sebaik-baiknya," ujar Berty.

Berty menjelaskan pada Minggu (6/6), kasus positif Covid-19 di DIY bertambah 295 orang berdasarkan pemeriksaan 1.505 sampel. Sehingga total sampel yang telah Pemda DIY periksa sebanyak 296.827 unit. Sementara untuk jumlah orang yang diperiksa kemarin bertambah 1.460 orang, sehingga total orang yang telah diperiksa sejauh ini sebanyak 271.326 orang.

Jumlah kasus sembuh bertambah 211 kasus, sehingga total kasus sembuh di DIY menjadi 42.375 Kasus.

Beralih pada kasus meninggal, tercatat penambahan sebanyak lima orang. Dari Gunungkidul pasien meninggal bertambah dua kasus, dan masing-masing satu pasien meninggal di Sleman, Bantul, dan Jogja. Total kasus meninggal karena Covid-19 di DIY saat ini berjumlah 1.219 orang.

Di Gunungkidul, 20 orang terkonfirmasi positif dari pabrik tas yang berlokasi di Nogosari, Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen.

Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Dewi Irawaty, mengakui adanya klaster baru tersebut. "Iya klaster pabrik tas, masih *tracing*," ucap Dewi.

Sementara itu, Pemerintah

Kabupaten Bantul menggelar *swab* PCR massal terhadap warga yang hadir dalam pemakaman jenazah Covid-19 tanpa protokol kesehatan di Lopati, Trimurti, Srandakan, 1 Juni lalu.

Namun dari 25 warga yang terdaftar dan harus menjalani *swab* PCR pada Sabtu (5/6), hanya enam warga yang hadir dan mengikuti.

Kepala Dinas Kesehatan Bantul, Agus Budi Raharja, mengatakan sampel *swab* langsung dikirim ke laboratorium, dan diharapkan hasil keluar Senin (7/6) hari ini.

Ketua RT 92, Lopati, Trimurti Kuswanto membantah warganya menolak pemakaman jenazah Covid-19 dengan protokol kesehatan, 1 Juni 2021 lalu. "Jadi bukan menolak. Hanya ada miskomunikasi saja," kata Kuswanto.

Kuswanto menceritakan jika jenazah datang tengah malam dalam keadaan sudah di dalam peti jenazah. Warga mencoba menghubungi sejumlah pihak termasuk Satgas Covid-19 tingkat kalurahan tetapi tidak direspons.

"Sampai subuh itu tidak ada petugas yang datang, akhirnya kami memakamkan sendiri," ungkapnya.

Meski memakamkan sendiri, Kuswanto menyatakan jenazah tetap di dalam peti dan saat disalatkan jenazah ada di dalam ambulans.

"Jika ada yang mengarahkan, kami manut kok. Sampai di makam tidak ada petugas pemakaman. Kami kira ada petugas dari RS ternyata dari satgas [wilayah] sendiri," katanya. (Heriambang Jati Kusumo)

Gap Data di DIY Konfirmasi dan Kematian Covid-19

Ada perbedaan data Covid-19 yang dirilis antara Pemda DIY dan pemerintah kabupaten/kota. Ketidaksinkronan data terjadi karena Pemda DIY hanya mencatat positif Covid-19 berdasarkan hasil tes *polymerase chain reaction* (PCR), sedangkan di kabupaten kota sudah menerapkan tes antigen



2 Maret- 31 Desember 2020

	Dinkes Pemda DIY	Dinkes Kab/Kota	Gap
Konfirmasi	12.155	12.066	89
Meninggal	260	304	-44

1 Januari-1 Juni 2021

	Dinkes Pemda DIY	Dinkes Kab/Kota	Gap
Konfirmasi	33.077	34.747	-1.670
Meninggal	936	1.142	-206

Total

	Dinkes Pemda DIY	Dinkes Kab/Kota	Gap
Konfirmasi	45.232	46.813	-1.581
Meninggal	1.196	1.446	-250

Grafis: Harian Jogja/Hengki Irawan Sumber: Laboratorium Statistik Terapan RoomSta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005